

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari pencapaian ide yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia yang pada prinsipnya, setiap orang harus memperoleh hasil bagi kerja kerasnya. Hal ini tentu harus dihargai akan suatu karya yang telah di ciptakannya¹. Akan tetapi banyak masyarakat belum memahami tentang kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) hingga saat ini belum tinggi. Hal ini tentu dapat dilihat dari berbagai realita yang ada pada saat ini². Beberapa pendapat mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan dan penghargaan pada individu atau badan atas temuannya atau ciptaanya untuk diberikan hak baik sosial maupun ekonomi. Yang mana dalam pemberian hak itu dilakukan secara eksklusif³. Hal ini tentu akan mengerikan dan berdampak pada hasil karya yang telah dibuat oleh sang pencipta itu sendiri, bilamana jika tidak adanya suatu perlindungan. Dapat kita lihat dinegara maju tepatnya diluar negeri.

Apresiasi masyarakat dan pemerintah negara maju sudah tinggi dan memahami, sehingga mereka rela memberikan upah yang layak.

¹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2011, *HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, Hal. 02.

² Cita yustisia serfiyani, Iswi Hariyani & Serfianto, 2017, *Buku pintar Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah mada university press, Hal. 12.

³ Afrillyanna purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *Trips-Wto & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Hal. 13.

Akibatnya para investor di negara-negara maju dapat hidup dengan layak dan makmur dalam menciptakan hal-hal baru. Maka dari itu di negara maju, para pembuat kerajinan atau pekerja seni menjadi bersemangat untuk menciptakan suatu karya⁴.

Mengenai Hak kekayaan intelektual yang ada di dunia ini, sebenarnya banyak memiliki ruang lingkup yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Untuk hak cipta merupakan karya seni, pertunjukan, karya tulis, karya lisan, karya suara, karya film. Sedangkan untuk hak kekayaan intelektual berupa hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, perlindungan varietas tanaman. Jika dilihat dari penggolongannya, hak cipta ialah seni, sedangkan hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan industri⁵. Berbicara mengenai hak cipta bukan tidak mungkin jika tidak ada penciptanya. Jika kita melihat pengertian dari pencipta, berdasarkan pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Sehingga dalam menciptakan suatu karya, pencipta rela mengorbankan waktu, uang dan segala pikiran hanya demi terciptanya hasil yang memuaskan⁶. Selain itu tak dapat dipungkiri bahwa Semakin majunya suatu zaman dan majunya teknologi saat ini tidak lepas dari yang namanya plagiat, pencurian karya serta tanpa mencantumkan nama dari pembuat karya⁷. Untuk

⁴ Cita Yustisia serfiyani, Iswi Hariyani & Serfianto, *Op. Cit.* Hal. 12.

⁵ *Ibid*, hal. 13.

⁶ Afrillyanna purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *Op. Cit*, hal. 12.

⁷ Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Jakarta: PT Alumni, Hal. 33.

itu dibutuhkan suatu perlindungan, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang mana untuk melindungi kekayaan intelektual dan hak cipta yang sudah ada sejak turun temurun⁸. Sebagai bangsa indonesia yang berbudaya, memang sudah seharusnya menjaga dan melestarikan warisan yang telah ada. Seperti halnya batik yang merupakan ciri khas tersendiri yang telah diakui di mata dunia. Bahkan badan PBB UNESCO memberikan keistimewaan kepada batik yang mana merupakan ciri khas indonesia sebagai identitas nasional⁹.

Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan hak cipta ialah pasal 40 ayat 1 huruf j undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur tentang ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas karya seni batik atau seni motif lain”.

Maka dari itu banyak saran dari pemerintah kepada pengusaha dan pengrajin yang ingin melakukan upaya untuk mendaftarkan hak cipta, mulai dengan cara pemberian fasilitas berupa keringanan biaya untuk pendaftaran hak cipta¹⁰. Sebenarnya dengan melakukan pendaftaran hak cipta terutama batik, selain melindungi batik dari pelanggaran hak cipta, tentu juga dapat membuat para pengusaha semakin tenang dengan keberadaan hak cipta yang

⁸ Diah Imanigrum Susanti, 2018, *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*, Malang: Setara press, Hal.05.

⁹ Endah Kartikaningsih, 2013, *Melestarikan Budaya Bangsa dengan Memakai Batik*, (7 mei 2013) dalam <https://www.kompasiana.com/endahk/5529862ef17e61117ed62422/melestarikan-budaya-bangsa-dengan-memakai-batik> diunduh jumat 07 february 2020 pukul 17: 12 wib

¹⁰ Ririn Sjafriani, 2010, *Pemerintah Bantu Biaya Hak Paten Motif Batik*, (15 mei 2010) dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/nasional/115724/pemerintah-bantu-biaya-hak-paten-motif-batik> diunduh jumat 07 february 2020 pukul 18:04 wib

melekat pada objek tersebut. Selain itu tidak adanya suatu kekhawatiran dalam diri individu mengenai hal yang dapat merenggut suatu hak nya karena sudah melakukan pendaftaran secara resmi dan dilindungi oleh hukum¹¹. Desa Kliwonan tepatnya di kecamatan masaran kabupaten sragen yang berbatasan dengan karanganyar merupakan desa wisata yang terkenal akan keunikan sentra batiknya. Terdapat berbagai macam pengusaha batik. Biasanya para pembatik di sentra Kliwonan menjual secara konvensional yaitu dengan cara dititipkan atau disetorkan ke pengepul dan langsung ke pedagang kios pasar klerwer, lalu di beri label sendiri oleh pengepul dan pedagang, maka dari itu batik Kliwonan menjadi kurang dikenal oleh masyarakat seacara luas¹².

Batik tulis Kliwonan merupakan suatu karya seni yang sudah ada sejak zaman dahulu. Yang mana asal mula terciptanya batik, erat kaitannya dengan Ki Ageng Butuh yang merupakan seseorang yang menguasai wilayah di desa Butuh. Hal ini ditandai dengan awal mula pembuatan dilakukan oleh abdi dalem keraton yang berada di desa Kliwonan. Seni motif batik, meskipun jika dilihat memiliki Corak dan motif yang dipengaruhi oleh gaya surakarta dan yogyakarta. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam Motif Batik Kliwonan yang cenderung berbeda dari batik pada umumnya, yaitu lebih cerah serta motifnya yang berupa flora dan fauna¹³. Setiap motif yang dibuat memiliki simbolis

¹¹ Hanni Sofia, 2018, *Perajin Batik Tuban Tenang Berkarya dengan Perlindungan Hak Cipta*, (03 mei 2018) dalam <https://www.antaranews.com/berita/706693/perajin-batik-tuban-tenang-berkarya-dengan-perlindungan-hak-cipta> diunduh jumat 07 february 2020 pukul 18:15 wib

¹² Tri agus yogawasista, 2013, *wisata belanja kampung batik kliwonan*, (21 agustus 2013) dalam <http://wisata-indonesia-elipl.blogspot.com/2013/08/wisata-belanja-kampung-batik-kliwonan.html> diunduh minggu 09 february 2020 pukul 13:11 wib

¹³ Puryanti, skripsi, 2010 “*Batik Kliwonan di kabupaten sragen*”, kearsipan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, UNS, Hal. 05.

makna jawa serta maksud tujuan adanya penciptaan tersebut untuk memberi kesejahteraan, ketentraman, kewibawaan, dan kemuliaan bagi status sosial seorang pemakai¹⁴. Maka dari itu sebagai warisan yang telah ada, selayaknya di jaga dan di daftarkan sebagai hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Agar tidak dengan mudah kehilangan jati diri dan identitas dari suatu wilayah yang selayaknya harus diakui dan dikenal secara menyeluruh¹⁵. Seorang pencipta yang telah memiliki hak cipta, Apabila dalam suatu hak cipta telah terjadi pelanggaran maka berdasarkan pasal 99 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwasanya :

“Pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.

Hak cipta sangat penting karena berbagai kelebihan yaitu produk menjadi mudah dipasarkan, dapat menguntungkan finansial sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menerus bertahan dari persaingan bisnis yang semakin hari semakin tidak sehat¹⁶. Implementasi perlindungan suatu hak cipta di wilayah desa kliwonan hingga saat ini belum menyeluruh dalam artian masih banyak pengusaha dan sentra batik yang belum mendaftarkan diri motif batik ciptaannya ke badan hukum dan ham bagian dirjen hak kekayaan intelektual. Padahal pemerintah daerah sragen sudah menyarankan dan memberi pengumuman untuk segera dilakukan pendaftaran

¹⁴ Puryanti, *Ibid*, Hal.22.

¹⁵ Iis Afriyanti, Thesis, 2017, *Perlindungan Hak cipta Terhadap Budaya Batik dalam Meningkatkan Kemajuan Daerah*, kearsipan fakultas syariah dan ekonomi islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Hal. 02.

¹⁶ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani & Serfianto, *Op. Cit*, Hal. 132.

hak cipta di wilayah tersebut. Ketidakpahaman masyarakat menjadikan kendala tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal ini didasari Keinginan pemerintah sragen untuk dilakukannya Pendaftaran hak kekayaan intelektual terutama hak cipta dengan harapan dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam berinovasi dan banyak dikenal masyarakat tidak hanya dalam negeri melainkan sampai mancanegara. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap folklore (budaya turun temurun) dan kebudayaan rakyat termasuk seni batik yaitu bertujuan untuk mencegah dari praktek monopoli dan komersialisasi serta tindakan yang merusak dan memanfaatkan tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Dan menghindari tindakan dari pihak asing ingin menghancurkan kebudayaan tradisional indonesia¹⁷.

Sesuai dengan latar belakang tulisan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK TULIS KLIWONAN (Studi kasus di desa kliwonan kecamatan masaran kabupaten sragen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas bahwasanya penulis ingin mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam mengatur Motif Batik tulis kliwonan ?

¹⁷ Affrilyanna Purba, *Op Cit.* Hal. 98.

2. Bagaimana Implementasi terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta motif batik tulis kliwonan di desa kliwonan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

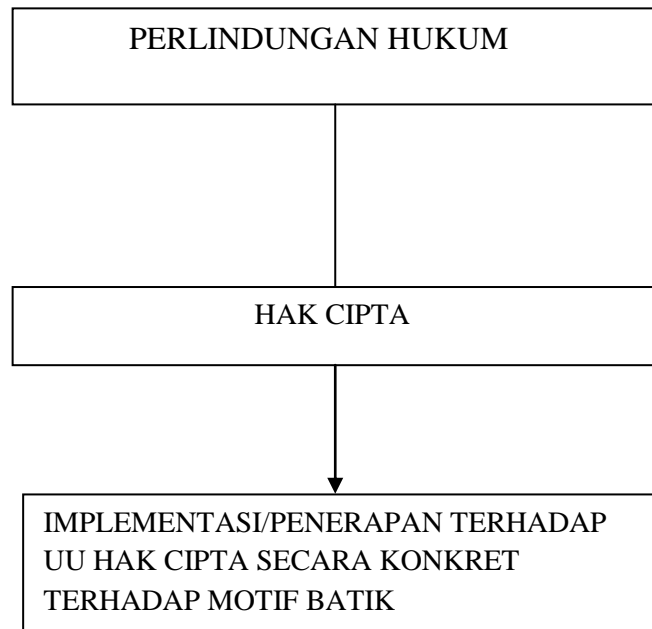
1. Tujuan Penelitian

Yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum hak cipta dalam mengatur motif batik tulis Kliwonan dan penerapan, pelaksanaan atau implementasi dari perlindungan hak cipta motif batik Kliwonan dan pendaftarannya yang ada pada pengusaha, dan pengrajin di desa kliwonan kecamatan masaran Kabupaten Sragen berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Manfaat Penelitian

Yang dapat diambil manfaat dari penelitian ini penulis berharap sekali untuk nantinya agar dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konkret oleh para pengrajin dan pengusaha terhadap suatu hak cipta yang ada pada desa kliwonan agar dapat menjadikan aset berharga serta menjadi lebih dikenal luas masyarakat, sehingga terciptanya suatu perlindungan hak cipta dapat ditegakkan dan sesuai tatanan peraturan hukum di indonesia

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dilihat bahwasanya Hak Cipta Motif pada dasarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi pada kerangka pemikiran ini lebih di fokuskan kepada Hak Cipta pada motif Batik Tulis Kliwonan, yang dimana pencipta sebenarnya dapat dilindungi oleh adanya kepastian hukum tentang hak cipta jika setiap individu baik pengusaha maupun masyarakat mendaftarkan dan mencatatkan setiap karya ciptaanya ke badan Hukum dan Ham bagian Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat hak-hak nya jika terjadi plagiasi yang merugikan pihak pencipta, karena dalam menghasilkan karya seni yang bercita rasa tinggi memerlukan

waktu dan pengorbanan yang tidak sedikit atau setidaknya para pihak lain dapat menghargai seni lebih mendalam. Hal ini diperkuat berdasarkan Pendapat John Locke menyatakan bahwasanya hak cipta memberikan hak-hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat¹⁸.

Peraturan lain terkait dengan hak cipta ialah seperti yang kita ketahui bahwasanya semenjak adanya undang-undang nomor 7 tahun 1997 Indonesia telah mengadopsi membentuk perjanjian internasional atau ratifikasi World Trade Organization (WTO) yang mana semenjak ada kesepakatan perjanjian memiliki melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan WTO, yang ada kaitannya dengan (Trips-WTO)¹⁹. Di dalam suatu Trips WTO terdapat berbagai norma dan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual serta perlindungan²⁰. Hal ini tentu memicu lahirnya undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yang berlaku sampai saat ini. Maka dari itu sesuai dengan objek yang diteliti yaitu batik dalam perlindungannya secara ekspresi budaya dan tradisional yang dilindungi termasuk kedalam pasal 38 undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang berisikan

¹⁸ Craig Joyce, William Patry, Marshall Leaffer & Peter Taszi, 1998, *copyright Law casebook series*, fourth edition, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, Hal. 56.

¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, 2003, *hak cipta musik atau lagu, program pacasarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 14.

²⁰ Ahmad Zen Umar Purba, 2001, *pokok-pokok kebijakan pembangunan sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 13, April, Hal. 8.

“(1) Hak cipta atas ekspresi budaya dipegang oleh negara. (2) Negara wajib menginventarisasikan, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud ayat (1)”.

Yang artinya negara wajib menjaga dan mengawasi kebendaan-kebendaan yang bersifat tradisional dan menjadi ciri khas suatu negara yang memungkinkan pihak lain dapat mengambil keuntungan tanpa seizin dari pemilik. Sebagai penguat dasar hukum, ada pendapat lain bernama Adrian sutedi yang menyatakan hak kekayaan intelektual merupakan hak atau wewenang kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan diatur dalam norma-norma yang berlaku seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, pengarang lagu²¹.

Intergovernmental commitee menggunakan istilah traditional knowledge yang merujuk pada makna atau substansi pengetahuan sebagai bagian dari hasil aktivitas intelektual dan pencerahan dalam konteks tradisional dan mencakup keterampilan, inovasi, praktek dan pembelajaran dan pengetahuan yang telah menyatu kedalam gaya hidup tradisional dari masyarakat dan terkodifikasi yang diturunkan dari generasi ke generasi²². Pendapat lain sebagai teori penguat adalah Stainforth Ricketson yang menyatakan

Pada teori tersebut pada intinya “seseorang memiliki hak alami dalam penciptaanya, yang mana setiap produk yang dihasilkan oleh penciptanya harus diakui sebagai dari hak milik alami pencipta, baik

²¹Nita novita, 2016, *haki (hak kekayaan intelektual)*, (12 juni 2016), dalam <http://nitinovitasr.blogspot.com/2016/06/haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html> diunduh jumat februari 2020 pukul 07: 49 wib

²² Diah imaningrum susanti, *perlindungan negara atas warisan budaya bangsa*, Op, Cit. Hal. 10.

benda berwujud maupun tidak berwujud yang sehubungan dengan hak cipta”²³.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya didasarkan pada teori alam saja melainkan dijustifikasi oleh penganut aliran dari utilitarian yang cenderung menggunakan prinsip ekonomi, maka diperlukan dalam rangka memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptaanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat²⁴.

Maka berdasarkan teori diatas Perlindungan Hak cipta patut untuk dilaksanakan karena pertimbangan aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan aspek moral. Aspek ekonomi, pencipta nilai karya ditentukan berdasarkan keindahan penampilan, keunikan wujud atau kelangkaan dan estetika yang dinikmati masyarakat. pencipta seringkali membatasi ciptaanya, sehingga ciptaanya sebelumnya menjadi penyetara kualitas dan rasionalitas ekonomi yang memberikan alasan perlindungan hak cipta yang mana memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayarkan²⁵. Sedangkan dilihat dari aspek moral, hak moral mencakup dua hal yaitu hak paterniti dan right of paternity hakikatnya diharuskan mencantumkan nama dari pencipta atau dicantumkan namanya dalam hasil ciptaannya. Hak ini bisa sebaliknya, apa menggunakan samaran atau tidak.

²³ Stainforth Ricketson, 1991, *The law of Intellectual property*, The Law Book Company, New York, Hal. 6.

²⁴ Marshall Leaffer, 1998, *Understanding copyright law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, Hal. 14.

²⁵ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Hal.14.

Hak ini pun diekspresikan kedalam larangan mengubah atau merusak maupun mengurangi²⁶.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian secara deskripsi atau deskriptif yang memiliki tujuan mengumpulkan berbagai data untuk nantinya disusun secara sistematis, dijelaskan secara rinci dan dianalisis menggunakan metode-metode hukum untuk nantinya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi²⁷. maka dari itu penulis dalam hal ini berusaha mendeskripsikan mengenai implementasi terhadap perlindungan hak cipta motif batik tulis kliwonan yang berada di desa kliwonan

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Pendekatan normatif yaitu mengkaji dari hukum tertulis, segi teori, sejarah, ruang lingkup, peraturan perundang-undangan²⁸. Sedangkan pendekatan Empiris merupakan penelitian hukum positif yang tidak tertulis berkaitan dengan aktivitas dalam masyarakat dan hubungan

²⁶ *Ibid*, Hal. 15.

²⁷ Beni ahmad saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 57.

²⁸ Abdulkadir muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 101.

antara masyarakat satu dengan yang lain²⁹. Penelitian hukum normatif mengkaji dengan cara melihat peraturan tertulis undang-undang yang berlaku terutama undang undang serta ruang lingkup dari materi hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan dasar penelitian ini dilakukan, apakah sudah terlaksana dan sesuai dengan dasar hukum ketentuan perundang-undangan hak cipta.

Sedangkan penelitian empiris mengkaji implempentasi terhadap perlindungan hak cipta motif batik kliwonan yang berada di desa kliwonan yang menjadi acuan dalam permasalahan apakah sudah diterapkan dan masyarakat mengerti terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual, bagaimana prosesnya dan apakah hak-hak masyarakat sudah terpenuhi mengingat pentingnya suatu kepastian perlindungan hukum hak cipta. Melihat pendekatan yang penulis lakukan merupakan Empiris maka untuk itu agar dapat dihubungkan dan dikaji berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan survey lapangan dengan terjun langsung dan mengumpulkan data-data yang berada di sentra batik kliwonan, Desa kliwonan kecamatan masaran kabupaten sragen.

4. Sumber Data

a. Data Primer

²⁹ *Ibid*, Hal. 150.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para pengrajin, pengusaha batik, kepala dinas Desa Kliwonan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Maka dari itu penulis tanpa perantara melakukan studi kasus pengambilan data di lokasi yang telah ditentukan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber buku-buku, pustaka, dokumen, hasil skripsi, thesis, disertasi, peraturan perundang-undangan resmi dan referensi yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dihadapi peneliti³⁰

(1). Bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- d. Wawancara

(2). Bahan hukum sekunder yaitu:

³⁰ Suteki & Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 214.

- a. buku- buku bacaan yang berkaitan dengan hak cipta dan hak kekayaan intelektual
- b. jurnal dan tulisan karya ilmiah

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam hal ini akan melakukan suatu penelitian menggunakan pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan berbagai bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang diperoleh dari penelitian dokumen resmi, buku, jurnal, karya ilmiah, dan perundang-undangan

b. Studi lapangan

peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan bahan data primer, dengan cara melakukan wawancara face to face antara pengusaha, pengrajin, kepala desa dan dinas terkait tanpa adanya paksaan di daerah kliwonan dan kabupaten sragen

6. Metode Analisis Data

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data secara runtut dan jelas, tersusun teratur dan rapi serta efektif. Dengan data baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga memudahkan dalam memahami dan mengenai hasil menganalisis yang telah diuraikan³¹.

³¹ Abdulkadir muhammad, *Op Cit.* Hal. 127.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memperoleh bagaimana gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut mengenai sistematikannya :

BAB I Pendahuluan yang isinya mengenai latar belakang dari permasalahan serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran, metode dan sistematika penulisan skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka yang menguraikan Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, Tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang batik.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu menjelaskan dan mendiskripsikan serta menganalisis gambaran umum terhadap Desa Kliwonan, perlindungan hukum terhadap motif batik tulis kliwonan yang diatur undang-undang hak cipta, implementasi terhadap perlindungan hukum hak cipta motif batik tulis kliwonan

BAB IV Penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengkaji dan analisis serta saran dari para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian di Desa kliwonan.